

**Support for Tax Contributions, Levies and Other Revenues for the Implementation of
Regional Autonomy**

**Dukungan Kontribusi Pajak, Retribusi Dan Pendapatan lain-lain
Untuk Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Eko Meiningsih Susilowati

Universitas Dharma-AUB Surakarta

Email: susilowatieko74@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berguna untuk menganalisis pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain terhadap pendapatan asli daerah. Populasinya laporan realisasi APBD pada DPPKA di Kota Surakarta. Sebagai sampel adalah laporan realisasi APBD selama tahun 2013-2015. Analisa menggunakan regresi linear berganda. Diperoleh hasil pajak daerah dan pendapatan lain-lain daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Retribusi pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Uji determinasi mendapatkan hasil sebesar 78,2% pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini.

Kata kunci: pajak, retribusi, pendapatan, otonomi

Abstract

This research is useful for analyzing taxes, levies and miscellaneous income against the original income of the region. The population reports the realization of the APBD at DPPKA in Surakarta City. As a sample is a report on the realization of the APBD during 2013-2015. The analysis uses multiple linear regression. Obtaining local tax proceeds and other regional miscellaneous income has a significant effect on the original regional income. The tax levy has an insignificant effect on the original income of the region. The determination test obtained a result of 78.2% the influence of independent variables on dependent variables. The rest were influenced by other variables that were not included in the study.

Keywords: tax, levy, income, autonomy

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah daerah dan berbagai pelayanan yang diberikan dilakukan dengan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabel. Selain itu untuk meningkatkan ekonomi dan kebijakan pajak digunakan prinsip-prinsip umum yaitu meliputi pertama yaitu Prinsip Sistematis didasarkan pada ketergantungan yang saling melengkapi. Asas ini tidak boleh menetapkan pajak yang melanggar integritas ekonomi negara, yaitu tidak boleh membatasi

pergerakan barang, karya, jasa, keuangan atau menerapkan pajak daerah yang memungkinkan untuk membentuk anggaran beberapa wilayah dengan mengorbankan wilayah lain, atau memaksakan pembayaran pajak pada pembayar pajak wilayah lain (Shipilova). Kedua yaitu Prinsip Efisiensi bertujuan untuk dimaksimalkan kepentingan masyarakat yang tinggal di wilayah sendiri. Ketiga yaitu Prinsip Kelayakan Ekonomi adalah kebijakan yang harus efisien dalam semua hal, yaitu jumlah yang dikumpulkan harus sesuai dengan kewajiban pajak. Penetapan pajak tidak dapat diskresioner. Menetapkan pajak perlu memperhitungkan ekonomi makro dan ekonomi mikro (Musaeva, 2013). Keempat adalah Prinsip Keadilan Sosial yaitu terletak pada kenyataan bahwa kebijakan pajak daerah harus difokuskan pada peningkatan kehidupan penduduk, penurunan tingkat pengangguran dan pemenuhan kebutuhan produksi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengendalikan inflasi, mengembangkan pendidikan, jaminan kesehatan dan bidang sosial lainnya. Kelima adalah Prinsip Kebulatan Suara yang berarti bahwa tidak diperbolehkan memperkenalkan keduanya pajak daerah yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat membatasi ruang gerak masyarakat, barang, jasa, dan keuangan dalam ekonomi yang terpadu, dan pajak daerah. Karena hal ini memungkinkan untuk membentuk anggaran di beberapa wilayah dengan mengorbankan pendapatan pajak dari wilayah lain atau untuk mengenakan pajak pembayaran kepada wajib pajak daerah lain (Aliev, dkk, 2014).

Pada penelitian Goncharenko (2013), mempunyai tujuan penelitian yaitu menganalisis pajak dan retribusi daerah untuk otonomi anggaran di Ukraina dan menentukan cara memperbaiki sistem perpajakan daerah tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pajak dan biaya daerah di Ukraina tidak memberikan kemandirian dalam hal keuangan pemerintahan daerah itu sendiri. Peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam pembentukan APBD untuk pemerintahan sendiri di Ukraina sebelum dan sesudah penerapan Kode Pajak Ukraina ditemukan hasil bahwa penerapan kode pajak, yang mengubah sistem pajak daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sistem perpajakan di Ukraina membutuhkan perbaikan lebih lanjut dengan memperbarui peraturan hukum daerah, pajak dan belanja dan memperbaiki mekanisme pemungutan pajak untuk mengubahnya menjadi sumber pendapatan yang efektif.

Penelitian Igonina, dkk (2016), hasil penelitian bahwa kebijakan pajak daerah yang efisien berkontribusi untuk menstabilkan produksi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kondisi sosial dan ekonomi, dan pembangunan keuangan daerah juga dapat

memastikan implementasi secara penuh prinsip-prinsip sistem perpajakan dan federalisme perpajakan di Rusia. Berdasarkan aspek ekonomi dan perpajakan terpadu, membangun dan menyediakan keuangan dan ekonomi pemerintahan daerah sendiri, menyediakan sarana pada semua tingkat pemerintahan dengan kebijakan moneter yang cukup untuk mencapai kebijakan ekonomi dan sosial serta memenuhi fungsi yang dibebankan dan melakukan tugas yang diberikan oleh pemerintah yang relevan. Kesimpulannya yaitu suatu peningkatan efisiensi kebijakan pajak daerah berdampak pada besarnya penerimaan pajak di Rusia dan akhirnya dapat berkontribusi pada pengembangan potensi perpajakan wilayah.

TINJAUAN PUSTAKA

Dasar pengembangan kelembagaan pemerintahan daerah adalah adanya sumber daya keuangan daerah. Masalah terjadi karena adanya kewenangan pelaksanaan program-program yang membutuhkan keuangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini terjadi dengan adanya fakta bahwa pajak dan belanja daerah yang sumber pendapatannya dari pemerintah daerah digunakan untuk anggaran daerah dan dirancang untuk kepentingan pemerintah daerah itu sendiri (Goncharenko, 2013). Untuk mengatasi masalah ekonomi ada kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan dari semua tingkat anggaran dan untuk mencari sumber daya tambahan dari pendapatan pajak difokuskan pada penguatan potensi pajak daerah. Terlepas dari yang telah dilakukan selama ini, kebijakan pajak daerah belum memberikan kontribusi untuk membiayai kewajiban. Efisiensi kebijakan pajak daerah berpengaruh pada besarnya pendapatan pajak dalam mata anggaran di Rusia, dan akhirnya berkontribusi pada pengembangan potensi perpajakan daerah. Kebijakan pajak daerah harus dianggap sebagai pajak agregat yang dilakukan oleh otoritas dari berbagai tingkatan di daerah. Dapat mengatur proses reproduksi teritorial dan membuat potensi pajak di daerah secara stabil dan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan pajak daerah berfungsi sebagai alat yang penting dalam memenuhi tugas dan fungsi daerah pada desentralisasi yang berhubungan dengan anggaran dan modernisasi ekonomi. Pemerintah daerah tidak boleh lupa membentuk pendapatan dasar dalam bentuk sistem penyediaan keuangan terpadu yang dibutuhkan. Dalam konteks modern tujuan dasar kebijakan pajak daerah adalah meningkatkan potensi perpajakan daerah sendiri dengan cara meningkatkan pendapatan untuk pemenuhan belanja. Selain itu, kebijakan pajak daerah harus efisien dan bisa berkontribusi untuk:

- a. Menstabilkan produksi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- b. Pemerataan pada aspek sosial ekonomi dan pembangunan daerah.
- c. Mengimplementasikan secara penuh dari prinsip-prinsip sistem perpajakan didasarkan pada kesatuan ruang ekonomi dan perpajakan.
- d. Menetapkan dan memberikan jaminan keuangan dan ekonomi pemerintahan daerah.
- e. Menyediakan semua tingkat pemerintahan dengan sarana moneter yang cukup untuk kebijakan ekonomi dan sosial serta memenuhi fungsi yang diberikan dan melakukan tugas dengan relevan dari otoritas pemerintah (Aliev dan Suleymanov, 2013).

Begitu penting untuk membedakan kebijakan suatu negara oleh otoritas pemerintah dalam kaitannya dengan kebijakan pajak dilakukan pemerintah daerah dalam kemajuan dalam kaitannya dengan wilayah yang ada. Ada tiga jenis kebijakan yang membedakan menurut pendapat pakar ekonomi, yaitu:

- a. Kebijakan terkait dengan batasan atau taksiran tertinggi dari tarif pajak atau yang ditentukan. Apabila melebihi ada konsekuensi yang negatif dalam ekonomi dan efek terbalik dalam pertumbuhan penerimaan pajak.
- b. Kebijakan pajak yang wajar. Kewajiban pajak yang memberikan kontribusi untuk pengembangan ekonomi, investasi dan kegiatan kewirausahaan. Termasuk juga membuat iklim pajak yang menguntungkan (Berezdivina).
- c. Kebijakan pajak yang memberikan tingkat pajak yang tinggi dengan pengembalian simultan ke pembayar pajak individu melalui lembaga sosial.

Untuk negara maju jenis kebijakan pajak yang pertama yang ditentukan bisa digabungkan dengan yang ketiga yaitu memberikan tingkat pajak yang tinggi dengan pengembalian simultan ke pembayar pajak individu. Namun untuk negara yang masih mengalami krisis ekonomi dan sosial perlu mentransfer dari kebijakan pajak yang pertama ke jenis yang kedua. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk memberikan prioritas perluasan modal, stimulasi kegiatan investasi, pengembangan struktur kawasan produksi, dan membutuhkan lebih aktif dalam hal kelancaran pembangunan sosial dan ekonomi tingkat daerah. Kebijakan pajak daerah sangat beragam, yang paling penting diantaranya yaitu:

- a. Pengembangan konsep dasar ilmiah dari sistem perpajakan dan federalisme perpajakan. Ini dibentuk atas dasar hukum ekonomi. Juga dari analisis ekstensif tentang keadaan

perkembangan keuangan dan perekonomian daerah, kebutuhan penduduk, dan faktor-faktor lainnya.

- b. Menentukan area dasar untuk menggunakan pajak di masa depan dan selama periode saat ini. Hal ini didasarkan pada cara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan ekonomi daerah, dengan mempertimbangkan antar daerah dan nasional.
- c. Melakukan tindakan praktis di tingkat federal, regional, dan tingkat lokal dan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan (Krivonosova, 2007). Kebijakan pajak daerah dapat diklasifikasikan menjadi strategi pajak dan taktik pajak. Strategi pajak daerah menentukan program federal dan jangka panjang di bidang perpajakan dihitung dengan perspektif dan menyediakan pemecahan tugas-tugas sosial dan ekonomi, dan pengembangan keuangan daerah (Merkushov). Dalam perkembangannya hal ini meramalkan kecenderungan dasar dari pengembangan ekonomi, bidang sosial dan perpajakan. Disamping itu untuk menentukan prinsip federalisme perpajakan dan perspektif dalam perbaikan sistem perpajakan negara, dan untuk menentukan pengarturan bidang perpajakan dan di berbagai bidang ekonomi daerah. Tujuan jangka panjang kebijakan pajak daerah dituntut untuk memusatkan upaya pemerintah dalam memecahkan masalah utama dalam pembangunan wilayah dengan menggunakan sistem regulator pajak. Dalam taktik pajak daerah menyelesaikan tugas dalam pengembangan tertentu pada setiap periode dengan membuat amandemen dengan sistem perpajakan dan mekanisme perpajakan. Taktik pajak harus mempunyai ciri fleksibilitas, hal ini bisa dilihat dari dinamika regional, ekonomi, dan pembangunan sosial (Aliev dan Suleymanov, 2013).

METODE

Penelitian ini berada di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset (DPPKA) di Kota Surakarta. Sebagai variabel dependen pendapatan asli daerah. Dan sebagai variabel independennya pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain daerah. Ini berupa penelitian kuantitatif. Data bersumber dari laporan realisasi APBD pada Pemerintah Kota Surakarta. Populasinya berupa laporan realisasi APBD DPPKA di Surakarta. Sebagai sampel adalah laporan realisasi APBD selama tahun 2013-2015. Analisa data dengan analisis regresi linear berganda.

HASIL PENELITIAN

Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	36	17100845069	53666580548	27714749540,19	8996046225,690
Pajak Daerah	36	10574886068	36009655647	18517301018,25	6415792324,277
Retribusi Daerah	36	3307434787	855075552	4802622820,53	1329960554,772
Pendapatan lain-lain	36	983223016	233054000000	122882485133	459193922913,7
Valid N (listwise)	36				

Pendapatan asli daerah (PAD) nilai minimumnya Rp. 17.100.845.069,-. Hasil ini menunjukkan Kota Surakarta masih sangat tergantung pada pusat dalam pembiayaan daerahnya. Karena itu Surakarta wajib menaikkan PAD nya dengan cara memaksimalkan segala potensi daerah yang dimilikinya sendiri. PAD memiliki nilai maksimum Rp. 53.666.580.548,-. Hasil ini menunjukkan Kota Surakarta mempunyai otonomi lebih besar untuk biaya pembangunan wilayah sendiri. PAD mempunyai mean Rp. 27.714.749.540,19 dan PAD mempunyai standar deviasi Rp. 8.996.046.225,690,- lebih kecil dari Rp. 27.714.749.540,19 yang artinya cenderung normal datanya.

Pajak daerah bernilai Rp. 10.574.886.068,-. Hasil ini menunjukkan Kota Surakarta harus mendorong kesadaran bagi semua wajib pajak juga mengoptimalkan pelayanan pemungutan di daerahnya. Pajak daerah memiliki nilai maksimum Rp. 36.009.655.647,-. Hasil ini menunjukkan Kota Surakarta mengalami peningkatan pendapatan pajak dari tahun sebelumnya. Pajak daerah memiliki mean Rp. 18.517.301.018,25 dan mempunyai standar deviasi Rp. 6.415.792.324,277,- lebih kecil dari Rp. 18.517.301.018,25 yang artinya cenderung normal datanya.

Retribusi daerah bernilai minimum Rp. 3.307.434.787,-. Hasil ini menunjukkan Kota Surakarta harus meningkatkan retribusi daerah untuk mengoptimalkan hasil pendapatan dari retribusi daerah. Retribusi daerah memiliki nilai maksimum Rp. 8.555.075.552,-. Hasil ini menunjukkan Kota Surakarta mengalami peningkatan pendapatan dari retribusi pajak dari tahun sebelumnya. Retribusi daerah memiliki mean Rp. 4.802.622.820,53 dan retribusi daerah

mempunyai standar deviasi Rp. 1.329.960.554,772,- lebih kecil dari Rp. 4.802.622.820,53 yang berarti cenderung normal datanya.

Pendapatan lain-lain bernilai minimum Rp. 983.223.016,-. Hasil ini menunjukkan Kota Surakarta mempunyai pendapatan yang lain diluar dari PAD, pajak daerah juga retribusi daerah yang lumayan banyak untuk biaya di pemerintahannya. Pendapatan lain-lain memiliki nilai maksimum Rp. 2.330.540.000.000,-. Ini berarti Kota Surakarta mampu mencukupi biaya belanjanya sendiri. Pendapatan lain-lain daerah memiliki mean Rp. 122.882.485.133,- dan pendapatan lain-bernilai standar deviasi Rp. 459.193.922,913,7,- lebih besar dari Rp. 122.882.485.133,- yang menunjukkan bahwa distribusi data cenderung tidak normal.

Tabel 2 di bawah ini adalah hasil uji regresi.

Tabel 2
Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std.Error	Beta			Tol	VIF
l (Constant)	3027872666,2	3469102380		,873	,389		
Pajak daerah	,994	,111	,709	8,972	,000	,997	1,003
Retribusi daerah	1,084	,564	,160	1,923	,063	,896	1,116
Pendapatan lain-lain	,009	,002	,449	5,382	,000	,894	1,118

Hasil pengujian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai kontanta 3,027 berarti bahwa pada saat variabel independen, pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain bernilai nol, maka PAD bernilai Rp. 3,027.
- Koefisien regresi pajak daerah 0,994, jika pajak daerah naik 1% dan variabel independen lain tetap, PAD akan meningkat 0,994 %.
- Koefisien regresi retribusi daerah 1,084, jika retribusi daerah naik 1% dan variabel independen lain tetap, PAD akan meningkat 1,084 %.
- Koefisien pendapatan lain-lain daerah 0,009, jika pendapatan lain-lain daerah naik 1% dan variabel independen lain tetap, PAD akan meningkat 0,009 %.

Tabel 3 di bawah ini merupakan hasil uji t.

Tabel 3
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std.Error	Beta			Tol	VIF
1 (Constant)	027872666,2	3469102380		,873	,389		
Pajak daerah	,994	,111	,709	8,972	,000	,997	1,003
Retribusi daerah	1,084	,564	,160	1,923	,063	,896	1,116
Pendapatan lain-lain	,009	,002	,449	5,382	,000	,894	1,118

Hasil uji t pajak daerah bernilai signifikansi 0,000. Hasil ini berarti pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Variabel retribusi daerah bernilai signifikansi sebesar 0,063. Hasil ini berarti retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD. Variabel pendapatan lain-lain bernilai signifikansi 0,000. Artinya pendapatan lain-lain berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Tabel 4 di bawah ini adalah hasil uji determinasi.

Tabel 4
Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of The Estimate	Durbin-Watson
1	,895 ^a	,801	,782	4197260308	1,535

Hasil dari uji determinasi sebesar 0,782. Ini berarti pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain menyumbang sebesar 78,2%. Sisanya 21,8% dipengaruhi oleh variabel lain.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.
2. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.
3. Pendapatan lain-lain berpengaruh signifikan terhadap PAD.
4. 78,2% variabel independen menyumbang terhadap variabel dependen. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Saran

Retribusi daerah bagi pemerintah kota seharusnya dilakukan secara optimal dalam penerimaannya. Hal ini dilakukan agar pemerintah kota dapat melaksanakan otonomi daerah dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliev, B.H., Suleymanov, M.M. (2013). *Regionalnaya nalogovaya politika v determinantah protsessov detsentralizatsii [Regional fiscal policy in determinants of decentralization pocesses]*. Economic Analysis:Theory and Practice, 40, 47-52.
- Aliev, B.K., Musaeva, K.M., Suleymanov, M.M. (2014), Methodological approaches towards assessing the efficacy of a Region's budgetary-taxation policy. *Asian Social Science*, 10(24), 35.
- Berezdivina, E.V. (N. D.), *Sistema pokazateley rezultativnosti subjekta budgetnogo planirovaniya [System of Indicators of Efficiency of Budgetary Planning Subject]*. Available from: http://www.politanaliz.ru/art_list_90.html. [Last retrieved on 2018 December].
- Goncharenko, M. (2013). Local taxes and levies as financial basis for local government in ukraine. *Viesoji Politika Ir Administravimas*, 12(4).

Igonina, L. L., Nabiyev, R. A., Alimirzoeva, M. G., Gulmagomedova, G. A., & Suleymanov, M. M. (2016). Reforming of regional fiscal policy as basis of increasing taxation potential of territories. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(4).

Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 4. Penerbit: UNDIP. Semarang.

Krivososova, N.Y. (2007), *Metodika otsenki regionalnoy budgetnoy politiki [Methodology of estimating Regional Budgetary Policy]*. *Bulletin of the Irkutsk State Economic Academy*, 3, 20-23.

Merkushov, V.V. (N. D.), *Integralnaya otsenka konkurentosposobnosti regionov [Integral estimation of regions competitiveness]*. Available from: <http://sopssecretary.narod.ru>. [Last retrieved on 2016 July].

Musaeva, K.M. (2013). Institutional aspects of tax planning in the conditions of reforming of tax system and improvement of tax management. *World Applied Sciences Journal*, 27(5), 643-648.

Shipilova, E.V. (N. D.), *Prioritety v otsenke effektivnosti rashodov budgeta pri provedenii vneshnego kontrolia regionalnogo budgeta [Priorities in estimating efficiency of budget expenses when carrying out external control regional budget]*. Available from: <http://www.openbudget.karelia.ru>. [Last retrieved on 2017 August].